BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pembangunan Paradigma Gerakan HMI

Meretas arah perjuangan HMI adalah keniscayaan dari proses sejarah dan kondisi kebangsaan dan keumatan yang mendera bangsa Indonesia pasca reformasi, hal ini menemukan pangkal logis dari pernyataan Jurgen Habermas bahwa: gerak manusia terbatasi oleh ruang dan waktu, maka kelangsungan eksistensi mereka sangat ditentukan oleh nilai-nilai tujuan (goal values/sollwerte) yang rentang perubahannya dapat ditoleransi dan ditakar secara empiris[17] HMI Dalam menentukan arah perjuangan--idealnya berangkat dari landasan filosofis yang berpangkal dari ruh konstitusi HMI itu sendiri dan diperkuat oleh landasan empiris berupa fakta yang menyeret HMI ke dalam corak pilihan sikap dan warna perjuangannya. Entitas misi kebangsaan dan keummatan yang terdapat dalam konstitusi HMI adalah landasan filosofis yang mesti dijadikan patron dalam menata arah perjuangan HMI kedepan, sementara fakta konflik ideologi yang berlangsung saat ini adalah fakta empiris yang mendorong formulasi gerakan yang mesti dipertimbangkan oleh HMI dalam menyongsong perubahan-perubahan struktural pada masa yang akan datang.

Dalam rangka mencapai Sollwerte yang lebih universal HMI

[17] Listiyono Santoso dkk., *Epistimologi Kiri*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media), h. 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktualnya muncul sebagai institusi yang melakukan gerakan pencerahan dan membebaskan dalam nafas kehidupan agama, bangsa dan negara melakukan pencerahan dan membebaskan dari kejumudan pikir dan tindakan adalah *crucial point* yang selalu menghidupi HMI. Dalam kullah inilah HMI pada dasarnya harus mampu menghindari diri dari primodialisasi client (penguatan kelompok), jika ini terjadi, maka HMI telah menyeret diri pada definisi persis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa radikal ekstrim dalam mendefenisikan dirinya kepada *the others*.

Dalam model perjuangan primodialisasi client yang ada adalah sikap eksklusif dan menafikkan kelompok lain dalam prakteknya selalu menjahui obyektifisme kritis, padahal segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, sosial harus dilakukan penilaian dengan terbuka dan jujur, bukan menilai dalam tataran nilai absolut, seperti yang dibedahkan oleh Mohamad Sobary : di tangan Tuhan, kebenaran mutlak memang mutlak. Tapi kita bukan Tuhan. Kita dengan sendirinya tidak bisa hidup mutlak-mutlakan. Dengan pegangan aturan yang serba sempurna kita tetap punya kecenderungan menyimpang.[18] Keterbukaan dan obyektifitas dalam menilai dan memahami ajaran agama pada siklus berikutnya akan melahirkan nilai-nilai universal yang mampu diterapkan dalam menilai the others.

Terjatuhnya kelompok liberal ekstrim dan radikal ekstrim ke

[18] Wisran Hadi, *HMI Transformatif*, (http//:HMI_Padang_IB_Sites.net diakses pada Sabtu, 29 Juni 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sikap yang fatalistic telah mengindikasikan model berpikir yang eksklusif dan melupakan nilai limiditas values yang selalu ada dalam diri manusia. Walhasil, gap social yang mungkin menimbulkan konflik kian terbentang panjang antara kedua kelompok ini, proses pencerahan tidak lagi menjadi cita-cita yang mesti dilakukan oleh kedua kelompok ini. Dalam kondisi inilah HMI harus mampu melakukan transformasi nilai-nilai keterbukaan dan korektif ke dalam masing-masing kelompok yang berseberangan. HMI dalam misi ini mesti melakukan pembebasan kelompok ini dari model pikir silogisme negatif ala Nietzsche yang cenderung menilai orang lain salah, pada adat-nya cenderung memakai bahasa aku dan kamu, makanya konflik antar dua kubu ini seolah-olah tidak bisa didamaikan.

HMI adalah ruh yang diambil dari pikiran Nurcholish Madjid dan merupakan sendi yang dibangun oleh Lafran Fane dalam gugusan konstitusi, dimana tujuan HMI untuk melahirkan insan pengabdi dan pencipta harus diterjemahkan sebagai langkah-langkah transformatif yang dilakukan oleh kader-kader HMI dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berada dalam ridho Allah SWT.

Keterdesakan HMI oleh berbagai tantangan struktural yang berasal dari eksternal telah menyebabkan HMI kehilangan akar gerakannya, massa yang mulai berpaling dari HMI, masyarakat yang menilai HMI adalah institusi yang melakukan pengkaderan politik *an sich* telah membuat HMI makin terpojok, keterdesakan inilah yang menyebabkan HMI dituntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memerankan diri berbeda dengan organisasi mahasiswa lain, yaitu peran yang betul-betul berbeda serta tidak ditemukan dalam organisasi-organisasi lainnya. Peran yang dimaksud ialah gerakan transformatif yang dapat dideteksi dari frame Nilai dasar perjuangan HMI yang bermuara pada proses liberasi, humanisasi dan transendensi semua ini adalah pilar-pilar terwujudnya proses pencerahan. Dalam konteks ini proses pencerahan yang merupakan inti dari proses transformasi dan aktualnya akan bermuara pada tataran kultural yang teroperasional dalam masyarakat dan umat.

Hakikat dari HMI transformatif ini lebih bersifat metodologis sebab konsep ini berkenaan dengan proses interpretatif dari Nilai Dasar Perjuangan HMI ke arah gerakan transformasi model pemikiran agama ke tengah-tengah masyarakat. Dan pada tahap berikutnya HMI transformatif menjadi sebuah tools analisis untuk melakukan transformasi kelompok-kelompok liberal ekstrim dan radikalisme ekstrim yang tengah tumbuh secara massif di Indonesia akhir-akhir ini.

Ide tentang HMI transformatif berpangkal dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam yang pada tataran ril memungkin menjadikan Islam sebagai force untuk melakukan transformasi pemikiran kepada masyarakat. Hal ini didorong oleh inklusifitas dalam memahami ajaran Islam yang menyangkut aspek sosio-ekonomi, sosio-politik dan sosio-kultural, berkenaan dengan ini HMI sebagai institusi yang kecenderungannya berada dalam garis yang concern untuk membentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cendikiawan muslim dalam proses pengkaderan, selayaknyalah mampu memerankan diri sebagai manufaktur yang memproduksi model pemikiran agama yang lebih solider. Kuntowijoyo dalam hal ini melihat Islam sebagai agama sekuler, yang ingin memperjuangkan pembebasan dan penyelamatan manusia di dunia kini dan di sinisuatu cita-cita eskatologis yang sudah pasti. Itu sebabnya orientasi altruisnya yang berdasarkan etika transendetal itu, juga harus diarahkan kepada kehidupan yang objektif-empiris.

Transformasi pemikiran yang mestinya dilaksanakan oleh Kader-kader HMI dilakukan dalam rangka mendorong proses demitologisasi buah pikiran yang diproduksi oleh kelompok-kelompok lain yang bersumber dari nilai-nilai pragmatisme dan lebih mengkristal sebagai hal yang bersifat subjektif-dogmatis. Dalam hal ini HMI idealnya mampu melakukan pencerahan terhadap kelompok ini dengan membawa nilai-nilai universal yang memihak kepada nilai obyektif empiris dalam memahami ajaran agama yang berhubungan dengan aspek sosio-ekonomi, sosio-politik dan sosio-kultural.

HMI dalam pergulatan ideologi harus mampu memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis dan model pemahaman terhadap agama yang lebih manusiawi. Hal ini urgen, agar agama diposisikan pada tempatnya. dimana Islam bagi HMI harus ditempatkan sebagai ruh dari perjuangan, tetapi bukan berarti Agama harus diterjemahkan sebagai alat legitimasi terhadap gerakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan HMI yang bersipat profan, agama bagi HMI mesti ditransformasikan sebagai nilai-nilai yang menghidupkan dan mengontrol gerakan yang bersifat sosio-ekonomi,sosio-politik dan sosio-kultural dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Transformasi yang dilakukan oleh HMI dapat menggunakan pemahaman yang diteorikan oleh Levi Strauss dalam The Savage Mindmelihat polarisasi manusia berdasarkan klan-klan disebabkan oleh logika konkrit yang diupayakan oleh manusia lewat penggunaan kode-kode konkrit (simbolisasi agama, politik dan budaya) oleh pikiran manusia untuk mengkonstruksi system-sistem signifikan. Kecenderungan manusia dalam menata dan mengkonstruksi dunianya berdasarkan identitas kelompok selalu terjebak dalam mitos dan berpindah dari satu mitos ke mitos yang lain. Dalam aras inilah kenyataan yang dialami oleh kelompok-kelompok liberal ekstrim dan radikal ekstrim memmenjarakan gerakan yang dilakoni oleh kelompok ini dalam mitos yang dikonstruksi oleh pikiran mekanik, hal ini di dorong oleh penggunaan simbol-simbol yang dikonstruksi berdasarkan pemikiran dan penetrasi ideologi particular, sehingga dalam kenyataannya simbol-simbol yang dikonstruksi ini menuai resistensi dari masyarakat. HMI dalam proses pencarian arah barunya, lebih tepat berangkat dari hal yang betul-betul obyektif-empiris dan berpangkal dari akar kultural yang berserakan dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Ruh dari gerakan transformatif yang idealnya dilakoni oleh HMI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai arah baru perjuangan HMI bertitik tolak dari QS. Ali Imran, 110:..kamu adalah sebaik-baik umat, yang dilahirkan bagi manusia, supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan, serta beriman kepada Allah. Ayat inilah pada dasarnya menstimulasi HMI sebagai gerakan transformatif dalam rangka mencerahkan semua umat, sehingga kehidupan sosio-ekonomi, sosio-politik dan sosio-kultural berbasiskan nilai-nilai universalisme Islam.

Ketika HMI diformulasi sebagai Institusi yang memproduksi kader-kader yang mampu melakukan transformasi terhadap masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, lantas apa langkah strategis untuk merangkai gerakan tersebut?. Proses transformasi bukanlah hal yang enteng untuk diwujudkan, proses ini membutuhkan keseriusan dan big capital berupa alat metodologis yang mampuni untuk mencerahkan pemikiran serta keberanian untuk mendekonstruksi mitos-mitos yang lahir akibat pengunaan kode-kode konkrit yang lahir dari tradisi pemikiran kelompok radikal.

2. Tahapan-tahapan Gerakan Sosial

Smelser [1962] mengungkapkan, ada empat komponen dasar dari tindakan sosial (social action), yaitu: (1) tujuan-tujuan yang bersifat umum (generalized ends) atau nilai-nilai (values), yang memberikan arahan yang paling luas terhadap perilaku sosial dengan tujuan tertentu (purposive social behavior); (2) ketentuan-ketentuan regulatif yang mengatur upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut, yakni aturan-aturan yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma (norms); (3) mobilisasi energi individual untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam kerangka normatif. Jika yang kita anggap sebagai aktor adalah individu, kita menanyakan bagaimana ia termotivasi; dan jika kita melihat dalam tingkatan sistem sosial, kita menanyakan bagaimana individu-individu yang termotivasi ini diorganisasikan dalam peran-peran dan organisasi-organisasi; (4) fasilitas situasional yang tersedia, di mana para aktor menggunakannya sebagai sarana. Fasilitas ini termasuk pengetahuan tentang lingkungan, perkiraan konsekuensi dari tindakan, perangkat dan keterampilan.[19]

Komponen paling umum dari tindakan sosial terletak dalam sistem nilai. Komponen ini begitu umum sehingga tidak punya spesifikasi norma, organisasi, atau fasilitas tertentu untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Nilai itu, misalnya, demokrasi, yang secara umum menjadi ideologi gerakan mahasiswa 1998. Meskipun ada elemen-elemen yang sama dalam definisi demokrasi di berbagai negara --seperti sistem representasi, kekuasaan mayoritas, dan sebagainya-- nilai ini tidak memberikan pengaturan institusional yang persis.

Norma bersifat lebih spesifik ketimbang nilai. Norma bisa bersifat formal, seperti ditemukan dalam peraturan hukum, bisa juga informal. Namun nilai dan norma saja belum menentukan bentuk organisasi tindakan manusia, seperti: siapa yang menjadi pelaksana upaya pencapaian tujuan ini, bagaimana tindakan-tindakan para pelaksana ini distrukturkan

[19] Smelser, Neil J, *Teori Perilaku Kolektif*. (New York: The Free Press, 1962), h. 24-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peran dan organisasi, semacam: gerakan mahasiswa, pers mahasiswa, dan sebagainya. Mobilisasi motivasi ke dalam tindakan terorganisasi adalah komponen ketiga untuk mewujudkan tujuan nilai dan norma tadi.

Komponen terakhir adalah fasilitas situasional. Ini bisa berupa sarana yang mendukung, bisa juga hambatan yang mempersulit pencapaian tujuan konkret dalam konteks peran dan organisasi. Komponen terakhir ini mengacu ke pengetahuan seorang aktor tentang peluang dan keterbatasan lingkungan, dan dalam sejumlah kasus, tentang pengetahuan terhadap kemampuannya sendiri dalam mempengaruhi lingkungan. Pengetahuan ini bersifat relatif, bagi kemungkinan pencapaian tujuan yang menjadi bagian dari keanggotaannya pada suatu peran atau organisasi.

Berbagai teori sebelumnya telah menunjukkan adanya kondisi-kondisi sosial, yang mengarah ke munculnya gerakan sosial. Namun ini barulah tahapan paling dini yang dilalui suatu gerakan sosial dalam periode waktu tertentu. Menurut Farley [1992], gerakan sosial kemudian melalui tahap organisasi, disusul birokratisasi atau institusionalisasi, dan akhirnya gerakan sosial cepat atau lambat akan mencapai periode surut (decline).[20]

Tahap Organisasi. Selama tahap organisasi, penekanan suatu gerakan sosial adalah pada mobilisasi orang, merekrut peserta baru, dan mencari perhatian media massa. Pada tahap ini, aksi demonstrasi,

---

[20] Op.cit., Farley, h. 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi DPR, boikot, dan sebagainya merupakan hal umum. Seringkali juga dilakukan upaya membangun koalisi dengan kelompok-kelompok lain terkait atau yang memiliki tujuan serupa. Membangun organisasi yang layak sangat krusial pada tahapan ini.

Tahap Institusionalisasi. Ketika mencapai tahap ini, gerakan sosial telah melewati batas, dari posisinya sebagai "sesuatu yang di luar kelaziman" menjadi bagian yang diterima oleh pola politik, religius, atau budaya masyarakat. Kantor dan struktur birokratik diciptakan untuk menuntaskan tugas-tugas gerakan. Jika tujuan-tujuan gerakan scara meluas diterima dalam masyarakat, gerakan itu menjadi bagian yang biasa dari struktur sosial masyarakat. Risiko bagi setiap gerakan yang telah mencapai tahap ini adalah ia akan menjadi bagian dari struktur sosial yang pada awalnya ia tentang dan mengambil beberapa karakteristik dari struktur tersebut.[21]

Tahap Surut. Pada akhirnya, sebuah gerakan mungkin mengalami kemerosotan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan: hilangnya seorang pemimpin kharismatis, pertentangan internal, merosotnya dukungan, atau mungkin karena gerakan itu sudah mencapai sasaran dan tujuan, dan tidak berhasil mengembangkan tujuan-tujuan baru. Meskipun kemerosotan di sini disebutkan paling akhir, kemerosotan ini bisa terjadi di titik manapun dalam perkembangan sebuah gerakan sosial. Kecuali jika tahap ini bisa

[21] Pada kenyataannya, ini adalah taktik umum yang dilakukan institusi-institusi yang ditantang oleh gerakan sosial. Mereka menawarkan posisi-posisi dalam institusi itu kepada pemimpin-pemimpin gerakan. Dengan cara demikian, mereka memberikan kepada para pemimpin gerakan itu "saham di dalam sistem". Cara ini sering berhasil dalam melunakkan kritik. Proses ini dinamakan kooptasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasi, tahap surut ini biasanya menandai berakhirnya sebuah gerakan sosial. Dalam sejumlah kasus, tahap surut ini bisa berbalik jadi kebangkitan lagi, ketika kondisi-kondisi sosial menjadi kondusif bagi babakan baru aktivitas gerakan.

Horton dan Hunt [1993] merumuskan tahapan gerakan sosial sebagai berikut: (1) tahap ketidaktenteraman, karena ketidakpastian dan ketidakpuasan semakin meningkat; (2) tahap perangsangan, yakni ketika perasan ketidakpuasan sudah sedemikian besar, penyebab-penyebabnya sudah diidentifikasi, dan saran-saran tindak lanjut sudah diperdebatkan; (3) tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa, dan organisasi serta taktik telah dimatangkan; (4) tahap institusionalisasi, yakni ketika organisasi telah diambil alih dari para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi serta program telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir kegiatan aktif dari gerakan sosial; (5) tahap pembubaran (disolusi), yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi tetap atau justru mengalami pembubaran.[22]

Dalam kasus gerakan mahasiswa 1998, tahapan organisasi, institusionalisasi, dan surut ini sudah dilalui. Tahapan surut mulai terlihat sesudah Soeharto berhenti. Namun gerakan mahasiswa Indonesia tidak pernah benar-benar berhenti, seperti kebangkitan dan aksi perlawanan mahasiswa yang telah terjadi di bawah pemerintahan BJ Habibie, dan aksi-

[22] Op.Cit., Horton, h. 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi sporadis di bawah pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Walaupun aksi-aksi mahasiswa itu tidak pernah mencapai puncak seperti periode Mei 1998.

B. Kajian Teori

1. Teori Gerakan Sosial

Gerakan mahasiswa pada dasarnya merupakan suatu gerakan sosial (social movement), yang adalah salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif (collective behavior). Menurut Turner dan Killan [1972], secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri.[23]

Batasan yang kurang formal dari gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan. Gerakan mahasiswa 1998 yang memiliki kadar kesinambungan tertentu dan bertujuan melakukan perubahan social-ekonomi-politik, cocok dengan definisi ini.

Sedangkan Blumer [1974] menyatakan, sebuah gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Biasanya, gerakan ini melibatkan

---

[23] Turner, Ralph H, dan Lewis M. Killan. 1972. Collective Behaviour, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Bab 3-12, sebagaimana dikutip dalam Paul B. Horton dan Chester L. Hunt.. *Sosiologi Jilid 2 (Alih Bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari).*(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara-cara yang tidak-terlembagakan, seperti pawai, demonstrasi, protes, untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan-gerakan sosial melibatkan jumlah orang yang cukup banyak dan biasanya berlanjut untuk rentang waktu yang cukup panjang.[24] Gerakan mahasiswa 1998 dengan aksi-aksi massanya juga cocok dengan rumusan ini.

Gerakan sosial bersifat lebih terorganisasi dan lebih memiliki tujuan dibandingkan perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi secara spontan, namun gerakan sosial membutuhkan organisasi. Gerakan-gerakan sosial lebih umum terdapat di negara-negara industri ketimbang di negara-negara pra-industri, dan lebih umum terdapat dalam masyarakat yang relatif demokratis ketimbang di masyarakat otoriter.[25]

Dengan adanya industrialisasi, kelompok-kelompok kepentingan menjadi jauh lebih beragam, dan kontrol sosial melemah, yang memudahkan orang untuk berorganisasi melawan kondisi atau gagasan yang mereka tentang. Demokrasi memberi dampak serupa, sementara rezim-rezim otoriter memandang gerakan sosial sebagai ancaman, sehingga menggunakan berbagai cara untuk meredam gerakan sosial sebelum menjadi populer dan memperoleh banyak pengikut.[26]

---

[24] Blumer, Herbert G., *Social Movements*, dalam R. Serge Denisoff (ed.). 1974. The Sociology of Dissent. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, sebagaimana dikutip dalam John E. Farley. 1992. Sociology. New Jersey: Prentice Hall, h. 586

[25] Farley, op.cit., h. 586

[26] Bagaimanapun, adanya industrialisasi telah membuat langkah-langkah untuk meredam gerakan sosial ini makin sulit dilakukan. Tak heran, negara komunis seperti Uni Soviet dan Polandia telah mengalami perubahan berkat munculnya gerakan sosial dan respons terhadap gerakan sosial tersebut. Pada 1991, gerakan buruh Solidaritas, yang bermula dari gerakan protes, telah menjadi kekuatan yang memerintah di Polandia. Gerakan demokratis juga meruntuhkan komunisme di Uni Soviet pada 1991. Sesudah Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur mengalami demokratisasi, berbagai gerakan etnis, religius, dan nasionalis bermunculan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sejumlah teori yang mencoba menunjukkan akar dari gerakan sosial. Pertama, Teori Deprivasi Relatif (Relative Deprivation Theory). Menurut konsep deprivasi relatif, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gerakan sosial muncul ketika orang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan selayaknya, relatif dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain atau bagaimana mereka merasa seharusnya diperlakukan [Geschwender, 1964; Gurney dan Tierney, 1982].[27] Walau teori ini juga mengacu ke keadaan psikologis atau perasaan, keadaan itu jelas merupakan produk dari kondisi-kondisi sosial tertentu.

Sebagai contoh, deprivasi relatif makin meningkat di kebanyakan negara terbelakang. Pemerintah negara-negara Dunia Ketiga, yang belum lama menyatakan kemerdekaannya, tidak mampu berbuat banyak untuk memenuhi harapan rakyatnya. Revolusi sangat mungkin terjadi bukan dalam masa di mana rakyat mengalami penderitaan terparah, tapi dalam masa ketika keadaan mulai menjadi baik, yang justru mengakibatkan timbulnya peningkatan harapan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika orang diarahkan untuk percaya bahwa kondisi mereka akan membaik dan ternyata itu tidak terbukti, mereka tampaknya akan merasa terabaikan. Ini kadang-kadang disebut revolusi akibat harapan

---

Akibatnya, negara-nergara ini, khususnya Uni Soviet dan Yugoslavia, Bergerak! ke arah pembubaran pemerintah pusat dan pecah menjadi beberapa republik merdeka.

[27] Lihat James A. Geschmender. 1964. "Social Structure and the Negro Revolt: An Examination of Hypotheses. Social Forces 43: h. 250-256. Serta Joan N. Gurney dan Kathleen T. Tierney. 1982. "Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty Years of Theory and Research." Sociological Quarterly 23: h. 33-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meningkat atau revolution of rising expectations [Davies, 1962].[28]

Hal penting yang harus dicatat di sini, deprivasi mutlak (absolute) justru tidak memunculkan gerakan sosial. Dalam kondisi negara di mana seluruh rakyat dalam keadaan miskin, terdapat deprivasi mutlak yang besar, namun tidak terdapat deprivasi relatif. Setiap orang tidak tahu hal lain kecuali kemiskinan, sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, dalam negara di mana kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin mencolok, orang miskin akan sadar akan perbedaan situasi itu dan mungkin akan merasa diabaikan.

Dalam kaitan gerakan mahasiswa 1998, teori ini cukup relevan. Krisis ekonomi yang parah sejak Juli 1997 menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masyarakat kelas menengah Indonesia, yang selama ini terkesan tenang dan patuh pada rezim, mulai gelisah dan ikut mendukung dalam gerakan reformasi. Keikutsertaan tersebut tampaknya dipicu oleh kepentingan mereka yang mulai terganggu oleh pembusukan sistem Orde Baru di bawah Soeharto, yang prosesnya makin dipercepat dengan terjadinya krisis ekonomi. Berbagai pemberitaan pers nasional pada periode awal 1998 menjelang kejatuhan Soeharto menunjukkan, bagaimana lapisan kelas menengah perkotaan ini mendukung gerakan mahasiswa dengan pasokan dana dan logistik dalam aksi-aksinya.[29]

---

28 Davies, James C. 1962. "Toward A Theory of Revolution". American Sociological Review 27: h. 5-19

29 Peneliti, yang sempat ikut "menginap" di gedung DPR/MPR Senayan pada puncak-puncak aksi gerakan mahasiswa pada Mei 1998, melihat sendiri sumbangan kalangan kelas menengah, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mahasiswa turun ke jalan, selain karena kondisi obyektif yang telah disebutkan di atas, juga ada kondisi subyektif yang langsung berhubungan dengan kepentingan mahasiswa. Kondisi subyektif akibat krisis ekonomi itu antara lain berupa meningkatnya biaya kebutuhan hidup, juga biaya untuk keperluan kuliah di perguruan tinggi. Dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, uang dari orangtua yang bisa dialokasikan untuk keperluan akademis juga semakin minim.[30] Bahkan banyak mahasiswa terancam drop out.

Kesulitan keuangan ini terutama dirasakan para mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS), yang biaya kuliahnya relatif jauh lebih mahal daripada di perguruan tinggi negeri (PTN). Maka bisa dipahami bahwa dalam aksi-aksi mahasiswa 1997-1998, terlihat sangat besar peranan mahasiswa dari PTS. Sikap mereka juga tampak lebih radikal.[31]

Krisis ekonomi juga menghasilkan banyak perusahaan ditutup, pengangguran meningkat, dan makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, mahasiswa juga merasa kepentingannya terancam. Mereka –terutama yang sudah kuliah di tingkat akhir-- tidak melihat urgensi untuk cepat menyelesaikan kuliah karena prospek lapangan kerja

---

mendrop bantuan air minum Aqua dan ribuan nasi bungkus untuk mahasiswa. Kelompok semacam Suara Ibu Peduli, yang dipimpin Karlina Leksono dan Gadis Arivia, salah satu dari sekian banyak kelompok LSM yang berpartisipasi, ikut andil dalam mobilisasi bantuan logistik ini. Pengusaha Arifin Panigoro diketahui juga menjadikan rumahnya sebagai basis logistik.

30 Magenda, Burhan D., "Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan", dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. 1995. Jakarta: Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia

31 Dalam kasus "Revolusi Mei" 1968 di Perancis, di mana mahasiswa melancarkan aksi melawan Presiden De Gaulle yang dianggap bertanggungjawab atas rusaknya kehidupan politik dan ekonomi, 70 persen mahasiswa mengalami drop out akibat kondisi sosial-ekonomi yang parah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang suram. Maka memprotes keadaan dengan turun ke jalan tampaknya menjadi pilihan yang wajar.[32]

Kedua, Teori Mobilisasi Sumberdaya (Resource Mobilization Theory). Teori ini berargumen bahwa gerakan sosial muncul ketika orang memiliki akses pada sumberdaya, yang memungkinkan mereka mengorganisasikan suatu gerakan. Menurut asumsi teori ini, sejumlah ketidakpuasan selalu ada dalam masyarakat, namun sumberdaya yang dibutuhkan untuk membentuk gerakan-gerakan sosial tidak selalu tersedia [McCarthy dan Zald, 1973, 1977].[33]

Jadi teori ini tampak lebih menekankan pada teknik, dan bukan pada penyebab gerakan sosial. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pendayagunaan sumberdaya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial, karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang baik. Penganut teori ini memandang kepemimpinan, organisasi, dan taktik sebagai faktor utama yang menentukan sukses-tidaknya suatu gerakan sosial.

Namun teori ini tidak berlaku pada gerakan ekspresif atau gerakan perpindahan (migratory movements), yang terbukti dapat berhasil tanpa adanya organisasi atau taktik. Mungkin saja mobilitas sumberdaya

---

32 Lihat Roberts, Ron. E. dan Robert Marsh Kloss. 1979. Social Movements: Between the Balcony and the Barricade. St. Louis: The CV. Mosby Company,.h. 22. Jarak antara kondisi-kondisi kondusif bagi suatu gerakan dan motivasi social-psikologis dari para anggota gerakan itu bersifat analitis, dan dalam realitasnya sangat sulit dipisahkan. Disiplin ilmu yang menangani jenis analisis di mana kondisi sodial bertemu dengan motivasi individu adalah psikologi sosial.

33 Lihat John D. McCarthy dan Mayer N. Zald. 1973. The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization. Morristown, NJ: General Learning Press. Serta John D. McCarthy dan Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory." American Journal of Sociology 82: h. 1212-1241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang peran dalam gerakan sosial, tetapi dalam kadar yang tidak dapat ditentukan.

Namun dalam konteks gerakan mahasiswa 1998, sumberdaya bagi gerakan mahasiswa tampaknya dimudahkan karena adanya dukungan yang kuat dari berbagai kalangan masyarakat, di dalam maupun luar kampus. Sumbangan dalam berbagai macam bentuk dari dosen, alumni, pengusaha, kalangan kelas menengah dan kaum profesional, organisasi nonpemerintah, pers dalam dan luar negeri, untuk gerakan mahasiswa punya andil besar dalam menggulirkan gerakan tersebut secara berkesinambungan.

Ketiga, Teori Proses-Politik. Teori ini erat kaitannya dengan Teori Mobilisasi Sumberdaya. Pendekatan teori proses-politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan, yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar [Tilly, 1978].[34] Tidak adanya represi yang diasosiasikan dengan masyarakat-masyarakat demokratis, industrialisasi, dan urbanisasi, dan adanya lingkungan politik yang memadai, misalnya, memudahkan bagi munculnya gerakan-gerakan sosial.[35] Ketika orang menyadari bahwa sistem itu rawan terhadap protes, gerakan-gerakan sosial tampaknya lebih terdorong untuk muncul.

Dalam kaitan gerakan mahasiswa 1998, kondisi makro ekonomi-

---

34 Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Reading,MA: Addison-Wesley.

35 Sebuah studi perbandingan tahun 1981 menunjukkan bagaimana gerakan sosial lebih berkembang dalam lingkungan politik yang pas. Gerakan anti-nuklir di Jerman Barat dan Perancis muncul pada waktu yang bersamaan, namun kemudian gerakan itu lebih tumbuh dan berkembang di Jerman ketimbang di Perancis. Alasannya: Aturan prosedur peninjauan ulang kebijaksanaan pemerintah di Jerman memberi peluang bagi pihak yang menentang tenaga nuklir untuk mengintervensi. Sedangkan kondisi semacam ini tak terdapat di Perancis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik di Indonesia saat itu tampaknya menyediakan peluang-peluang bagi gerakan mahasiswa. Pemerintah Soeharto dalam keadaan lemah secara ekonomi, di bawah tekanan internasional yang memiliki sumberdaya ekonomi, sehingga harus melakukan kompromi-kompromi dan mau tak mau harus melonggarkan represinya.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai rujukan dari penelusuran hasil penelitian yang terkait dengan tema yang diteliti, peneliti berusaha mencari referensi hasil penelitian yang dikaji peneliti-peneliti terdahulu, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengkaji tema yang diteliti. Peneliti terdahulu bertemakan tentang perubahan budaya pada arek surabaya. Tesis yang ditulis oleh Autar, memfokuskan penelitiannya pada budaya arek surabaya pada tahun 1985 sampai 2005.

Walau ada persamaan di term perubahan sosial penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam obyek penelitian yakni pada HMI Cabang Surabaya sebagai jembatan perubahan sosialnya, kajian yang dipakai dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada organisasi dan gerakan HMI Cabang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id